

**Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara Berdasarkan Putusan MK
Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka Membangun Pengelolaan Hutan yang
Berkelanjutan**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum**

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Arief Argya Saputra

NIM. E0013064

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum Ini (Skripsi)

**Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara Berdasarkan Putusan MK
Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka Membangun Pengelolaan Hutan yang
Berkelanjutan**

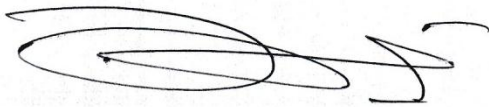
Disusun Oleh :

Arief Argya Saputra

E0013064

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I




Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi

Handayani, S.H., M.M

NIP. 197210082005012001

Pembimbing II



Wida Astuti S.H., M.H

NIP. 196007151988032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara Berdasarkan Putusan MK Nomor
35/PUU-X/2012 dalam Rangka Membangun Pengelolaan Hutan yang
Berkelanjutan**

Oleh:

Arief Argya Saputra

NIM. E0013064

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 13 April 2017

DEWAN PENGUJI

1. Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si

NIP. 195602121985031004

Ketua

2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M

NIP. 197210082005012001

Sekretaris

3. Wida Astuti S.H.,M.H

• NIP. 196007151988032001

Anggota



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Argya Saputra

NIM : E0013064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka Membangun Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citiasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 6 April 2017

Yang membuat pernyataan,



Arief Argya Saputra

NIM. E0013064

MOTTO

“Karena hidup memerlukan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Maka berbuatlah baik kepada siapapun walaupun dia menyakitimu, maafkanlah orang lain karena tidak ada kerugian jika kita memaafkan orang lain, dan tidak rugi pula jika kita meminta maaf dahulu”

(Dwi Saputra S.Sos.,M.Si)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan
terimakasih kepada:**

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rizki-Nya.
2. Kedua orangtuaku tersayang bapak Dwi Saputra S.Sos.,M.Si dan Ibu Emi Haryani S.Ip.,M.M atas segenap curahan kasih sayang, cinta, nasehat, dan doa yang tiada henti serta bimbingan dan dukungan yang selalu tercurahkan untuk penulis.
3. Banu Yoga Harsaputra adik kandung penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangatnya, semoga dilancarkan segala sesuatunya
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah member bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan.

ABSTRAK

Arief Argya Saputra, E0013064, Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka Membangun Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Penulisan hukum ini mempunyai tujuan guna mengetahui seberapa jauh pengelolaan hutan negara terutama pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dimana pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Inti daripada putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah diakuinya hutan adat menjadi hutan hak serta pengelolaannya diserahkan secara penuh terhadap masyarakat adat. Sehingga dalam pengelolaan hutan, negara sudah tidak terlibat dalam pengelolaan hutan adat, tetapi sebagai negara yang menguasai, hendaknya negara tidak memberikan kekuasaan penuh pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat tanpa pengawasan, pelatihan, dan pendampingan

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat perspektif atau terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari data primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan juga putusan hakim. Lalu data sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yaitu buku, referensi, jurnal hukum, majalah, internet. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa negara dalam mengelola hutan negara belum sepenuhnya memenuhi prinsip prinsip fungsi lingkungan. Dari prinsip yang disebutkan belum seluruhnya dilaksanakan oleh negara dalam mengelola sumber daya hutannya. Dalam hal pembangunan berkelanjutan, hutan negara saat ini masih dirasa belum memenuhi unsur pembangunan berkelanjutan, karena jika dilihat masih banyak faktor ekonomi mendominasi dalam pengelolaan hutan sendiri. Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang intinya mengakui hutan adat menjadi hutan hak dan juga hutan adat tidak dikelola lagi oleh negara. Pada hal ini, semestinya negara memberikan pelatihan, pengawasan, dan juga pendampingan terhadap masyarakat hukum adat yang diberikan kewenangan mengelola hutan adatnya sendiri.

Kata Kunci: Fungsi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, hutan negara

ABSTRACT

Arief Argya Saputra, E0013251, Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka Membangun Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan)

This Study aims to determine how far the state forest management, especially after the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012, where the forest management regulated in Law Number 41 of 1999 on Forestry. Core rather than the Constitutional Court decision No. 35 / PUU-X / 2012 is the recognition of indigenous forest to forest rights and its management handed over in full to the indigenous peoples. So in forest management, the state is not involved in the management of indigenous forests, but as countries who have control, the state should not give the full power of indigenous forest management to the indigenous community without supervision, training, and mentoring.

This study uses normative research or applied perspective. The approach used in this study is the approach of legislation. Types and sources of legal materials consist of primary data that consists of legislation, official records, as well as the judge's decision. Then the secondary data obtained from all the publicity about the law, namely books, references, legal journals, magazines, internet. This study uses data collection techniques to the study of literature.

Based on the discussion, it can be concluded that the state in managing the state forest has not complied with the principles of environmental functions, especially in the management of forest resources. The implementation of thhe principle of sustainable development were not maximal, seen from the dominating factor of economic development in its own forest management. Following the Ruling of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012 which in essence recognizes indigenous forest to forest rights and indigenous forests also no longer managed by the state. In this case, the state should provide training, supervision, and assistance to indigenous peoples were given the authority to manage their own customary forests.

Keywords : environmental functions, sustainable developments, state forest

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala petunjuk, rahmat dan rejeki yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul “**Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka Membangun Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan**”. Penulisan hukum ini mempunyai tujuan guna mengetahui seberapa jauh pengelolaan hutan negara terutama pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dimana pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Inti daripada putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah diakuinya hutan adat menjadi hutan hak serta pengelolaanya diserahkan secara penuh terhadap masyarakat adat. Sehingga dalam pengelolaan hutan, negara sudah tidak terlibat dalam pengelolaan hutan adat, tetapi sebagai negara yang menguasai, hendaknya negara tidak memberikan kekuasaan penuh pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat tanpa pengawasan, pelatihan, dan pendampingan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum ini, maka perkenalkan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta sekaligus Pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Wida Astuti S.H.,M.H selaku pembimbing II penulisan hukum (Skripsi) yang telah memberikan arahan, bimbingan hingga selesainya penulisan hukum ini;

4. Mohammad Adnan S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berarti dalam proses belajar mengajar penulis selama menempuh kuliah dari semester awal hingga sekarang;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
6. Orang tua dan seluruh Keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakanku yang membantu penulis dalam berproses dan mengajarkan banyak hal dalam hidup;
7. Sahabat-sahabatku Andreyan Nata, Mahendra Arga, Azhar Arraid yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini;
8. Teman seperjuangan satu atap “alim” Anto Andreawan, Andro Dewantara, Cesar Uji, Hersapta Danis, Bramastho Putro yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
9. Alviandini Nanda Fajri’ah yang selalu setia memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Teman seperjuangan “alim” Muliani Safitri, Meviana Gina, Milatun Nadiah, Nurul puspitasari ;
11. Sahabat yang tak kenal lelah Kunti Karisma, Alifia Dea, Rafika Emi, Prista Prasiwi yang selalu megingatkan penulis guna menyelesaikan penulisan ini.
12. Keluarga KSP “Principium” Ivan Reynaldi, Pratama Hendrawan, Lingga Detika, Embun Nurani, Revita Ernawati, Tri Widarti, serta keluarga divisi PPA Hendrik Barita, Rangga Yusuf, Melati Silitonga, Shafira Balqis, Nabilla Tessa, Meliana Sinaga, Andina Larasati dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Sahabat Kuliah Kerja Nyata puntukdoro squad Hanafi, Retno, Titi, Wati, Febri, Regina, Gesti, Anna, Santi semoga tetap ingat kenangan KKN;
14. Sahabat 5CM, Lelyanna, Tegar Adi, Adityastamtomo dan seperjuangan lomba Oryza Ayu, Rizqi Nurul semoga juara pertamanya berkah;

15. Sahabat ‘angkot’ Almira, Andira,, Ayas, Lina, Tika, Madya, Marynda, Murni, Ecik, Sagita, Vety, Wahyu Sucik, Yulian, Widya yang selalu menemani makan penulis;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta,

Penulis

Arief Argya Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan tentang hutan dan kehutanan.....	12
2. Tinjauan tentang pengelolaan hutan.....	14
3. Tinjauan tentang pembangunan berkelanjutan.....	17
4. Tinjauan tentang negara hukum	18
5. Tinjauan tentang putusan	20
6. Tinjauan tentang <i>judicial review</i>	21
B. Kerangka Pemikiran.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan hutan negara berdasarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.....	26
B. Apakah pengelolaan hutan negara berdasarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 telah sesuai dengan nilai fungsi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Matriks keterkaitan dalam pembangunan berkelanjutan	18
Tabel 2 Poin perubahan putusan MK no 35/PUU-X/2012 terhadap UU No 41	
Tahun 1999	40